



Menggali *Value* Praktik Akuntabilitas serta Transparansi di Tanah Lot

Dewa Gede Yudha Dananjaya^{1,2}
Basuki¹

¹Universitas Airlangga

²dananjayayudha@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:
Tanggal Masuk 31 Januari 2019
Tanggal Diterima 1 Mei 2019
Tersedia *Online* 14 Juni 2019

Kata Kunci:
**Akuntabilitas; Kearifan Lokal;
Tanah Lot; Transparansi**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap praktik akuntabilitas dan transparansi pada tanah lot yang didasarkan oleh sebuah ajaran moralitas di dalamnya. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, serta dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Ketertarikan peneliti memilih tanah lot karena menjadi objek wisata dengan pengunjung tertinggi selama 5 tahun terakhir dari tahun 2013 – 2018. Hasil akuntabilitas yang dilakukan oleh para pengelola sudah terdokumentasi, akuntabilitas merujuk kepada pengamalan ajaran *tri hita karana* serta pengelola melibatkan pihak eksternal di dalam pengelolaannya. Kelemahan masih terlihat yang dimana pengelola masih menggunakan sistem tiket manual. Kemudian transparansi yang dilakukan oleh pengelola masih kurang terutama dalam hal keuangan mereka yang cenderung terkesan tertutup.

1. Pendahuluan

Transparansi dan Akuntabilitas menjadi suatu hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan di setiap organisasi, baik organisasi swasta, keagamaan, pemerintahan maupun organisasi nirlaba lainnya. Transparansi dan akuntabilitas telah muncul sebagai cara untuk mengatasi kegagalan pembangunan dan defisit demokratis. Adanya pertanggungjawaban yang lebih besar maka kebocoran yang terjadi seperti korupsi dan inefisiensi akan diperbaiki (McGee & Gaventa, 2011). Organisasi nirlaba juga memiliki kewajiban moral didalam aktivitasnya yaitu dengan cara yang akuntabel dan transparan karena biasanya organisasi nirlaba beroperasi untuk masyarakat (Carroll, 1991).

Patrizia & Massimo (2014) menyatakan bahwa transparansi merupakan tersedianya informasi relevan dan dapat dipercaya mengenai kinerja, posisi keuangan, dan tata kelola perusahaan *nonprofit* organisasi. Piotrowski & Van Ryzin (2007) menemukan bahwa Transparansi dan kebebasan informasi dari pemerintah, akan lebih sulit untuk meminta pejabat atau pengelola bertanggung jawab atas tindakan mereka, akan tetapi dengan mengeluarkan informasi akan mendorong akuntabilitas yang demokratis. Transparansi didefinisikan membagi informasi dan bertindak secara terbuka yang memungkinkan para *stakeholders* mengumpulkan informasi yang mungkin penting untuk mengungkap pelanggaran dan membela kepentingan mereka (Adiloglu & Vuran, 2012). Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak (Kumalasari, 2016).

Mardiasmo (2002) menyatakan akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas sehingga Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (sistem *check and balances*) dalam organisasi *profit* dan *non profit*. Gelfand *et al* (2004) memandang akuntabilitas sebagai persepsi yang bertanggung jawab atas tindakan yang sesuai dengan kontinjensi interpersonal, sosial, dan struktural. Akuntabilitas sebagai mekanisme yang berperan penting dalam mencapai tata kelola yang akuntabel. Pengaturan terkait pertanggungjawaban memastikan bahwa pejabat publik atau organisasi publik tetap berada di jalur yang baik. Akuntabilitas sebagai mekanisme juga penting karena berkontribusi pada legitimasi pemerintahan publik, selain itu mekanisme Akuntabilitas juga dapat melayani tujuan yang lebih spesifik dan langsung (Bovens, 2010). Dua elemen ini harus ada agar terwujudnya suatu pengelolaan dan pelaporan yang baik sehingga menghasilkan sebuah informasi yang relevan bagi para pemangku kepentingan.

Siskawati *et al* (2016) meneliti praktik akuntabilitas pada masjid Jami' Sungai Jambu. Hasil dari penelitian tersebut ialah masih terdapatnya kelemahan dalam pengelolaan keuangan serta internal kontrol. Simanjuntak & Januarsi, (2011) Akuntabilitas dan Pengelolaan Dana di Masjid dengan pendekatan studi kasus menemukan bahwa Laporan Keuangan Masjid dilakukan sangat sederhana. Dengan bentuk, empat kolom yakni uraian, penerimaan, pengeluaran dan saldo. Darmada *et al* (2016) menemukan pengelolaan keuangan di Subak Delod Sema dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan didasarkan pada kearifan lokal *Pade Gelahang* yang menggunakan metode kualitatif yang menitikberatkan pada interpretasi perilaku manusia. Pengelolaan keuangan yang ada di Subak Delod Sema Desa Penarukan tidak melibatkan semua *krama* Subak, melainkan hanya melibatkan beberapa *prajuru* Subak dan *krama* yang menjadi panitia dalam setiap kegiatan di Subak. Mandarin *et al* (2017) meneliti Akuntabilitas pengelolaan dana dari sistem dana punia. Hasilnya bahwa Akuntabilitas sudah

cukup baik, pengelolaannya sudah mencakup transparansi, kewajiban, kontrol, tanggung jawab, dan responsif. Hal lain yang ditemukan yaitu; pertanggungjawaban yang diberikan oleh prajuru pura kepada karma desa berupa laporan pertanggungjawaban yang diperiksa oleh prajuru desa dan laporan secara lisan diumumkan lewat sangkepan.

Peneliti memilih topik ini karena melihat pentingnya Akuntabilitas serta Transparansi pada suatu organisasi, baik organisasi *profit*, *non profit*, keagamaan dan organisasi lainnya didalam mewujudkan suatu tata kelola yang baik atau *Good Corporate/Publik Governance*. Terkait pada pemilihan lokasi pada Tanah Lot karena terdapat sebuah dinamika bahwa berdasarkan data Dinas Pariwisata Provinsi Bali dari tahun 2012 - 2016 wisatawan yang berkunjung cukup banyak, menjadi objek wisata religius yang paling tinggi kunjungannya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Ini mencerminkan bahwa Tanah Lot memiliki daya tarik yang kuat. Selain itu dana yang dikelolapun tidak sedikit karena kunjungannya yang cukup tinggi tersebut sehingga peneliti tertarik untuk memilih Tanah Lot sebagai lokasi penelitian.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus merupakan salah satu penelitian yang menggunakan pendekatan *non mainstream* yang masuk pada kelompok paradigma *interpretive*. Penelitian *non mainstream* (kualitatif) lebih menekankan pada proses dimana peneliti harus berinteraksi secara regular dengan subjek penelitian di dalam lokasi penelitian, data diperoleh dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta berfokus pada pemahaman, dan penafsiran si peneliti atas objek penelitian (Basuki, 2016). Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus karena ingin mengetahui secara mendalam bagaimana tata kelola yang dilakukan oleh pengurus DTW Tanah Lot karena peneliti melihat fenomena bahwa tingginya pengunjung di DTW Tanah Lot. Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan cara Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Alat utama dalam proses pengumpulan data adalah diri sendiri si peneliti dengan dibantu dengan alat – alat perekam (audio/ video). Wawancara yang mendalam (*in-depth interview*) merupakan salah satu kekuatan penelitian *non mainstream*. Metode pengambilan data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah wawancara dengan menggunakan metode *semi structured* agar suasana tidak menjadi formal, lebih mengarah pada percakapan. Pengumpulan data dengan menggunakan observasi, dalam penelitian ini observer melakukan observasi langsung *direct observation* dengan melihat secara langsung dan mengamati segala aktivitas yang terjadi di situs penelitian. Catatan – catatan dari hasil pengamatan juga harus dibuat sesuai apa yang ditemukan di lapangan.

Pada penelitian ini model analisis data yang digunakan yaitu Model Triangulasi atau Triangulasi data (*Data Tringulation*) yaitu; membandingkan hasil wawancara seseorang dengan

orang lain. Membandingkan apa yang dikatakan narasumber/ informan di depan umum dengan yang dikatakan secara pribadi. Kemudian peneliti juga menggunakan Triangulasi Metode dengan melakukan pengecekan apakah hasil wawancara dan observasi konsisten dengan dokumentasi melakukan pengecekan apakah data yang didapat dari wawancara konsisten dengan observasi atau sebaliknya. R.K Yin, (1994) membagi ke dalam 5 (lima) komponen untuk mendesain studi kasus; pertanyaan penelitian (bagaimana dan kenapa), preposisi (jika ada), unit analisis, keterkaitan data dengan preposisi dan kriteria untuk menginterpretasikan hasil temuan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus. Peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara mendalam, dokumentasi, serta observasi. Peneliti ingin mengetahui pengelolaan DTW Tanah Lot, berangkat dari rasa penasaran karena peneliti melihat adanya fenomena besarnya pengunjung di DTW Tanah Lot. Unit analisis dari penelitian ini adalah DTW Tanah Lot. Peneliti membagi ke dalam 5 (lima) kriteria untuk menginterpretasikan hasil temuan lapangan; Akuntabilitas Hukum dan kejujuran, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Program, Akuntabilitas keuangan dan Transparansi.

Neuman, (2014) membagi Pengkodean (*coding*) menjadi 3 jenis yaitu: *open coding*, *axial coding* dan *selective coding*. *Open coding* yaitu pengkodean tahap pertama, dimana peneliti memeriksa dan meringkas data ke dalam kelompok atau kode awal (*preliminary categories and code*). Pada tahap *open coding* ini, peneliti melakukan pengelompokan transkrip wawancara ke dalam 5 kategori; Akuntabilitas kejujuran dan hukum, Akuntabilitas proses, Akuntabilitas program, Akuntabilitas keuangan dan Transparansi. Tahap kedua yaitu *Axial coding* ini adalah tahap kedua yaitu penyortiran dan mengorganisir data, serta melihat dan mencari keterkaitan (benang merah) yang menghubungkan data yang berasal dari berbagai sumber. Pada tahap kedua ini, peneliti melakukan analisa dari transkrip wawancara yang sudah di kelompokkan untuk mencari pernyataan yang terkait dengan penelitian. Selain itu, peneliti juga memasukan data dari proses dokumentasi serta observasi. Tahap ketiga yaitu *selective coding* yaitu melakukan identifikasi, peringkasan, pereduksian dan pengeditan data. Setelah itu melakukan pemilihan data yang relevan yang dapat dipakai sebagai pendukung analisis dan dapat dimasukan ke dalam laporan akhir penelitian dan diakhir peneliti melakukan proses interpretasi data. Pada tahap akhir ini, peneliti melakukan pereduksian, pengeditan data dari transkrip wawancara sehingga data yang muncul adalah data yang relevan dan terkait dengan penelitian. Selanjutnya, data yang sudah melewati tiga proses tersebut akan dimasukan ke dalam hasil dan pembahasan.

3. Analisis dan Pembahasan

Daya Tarik Wisata Tanah Lot merupakan tempat wisata yang berlokasi di desa Beraban, kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Tanah lot terletak sekitar 13 kilometer dari kota

Tabanan dan 22 kilometer dari kota Denpasar. Tanah Lot dibatasi oleh persawahan disebelah utara, Pan Pasific Nirwana Bali Resort disebelah timur, Samudera Indonesia sebelah selatannya, dan sungai Yeh Kutikan sebelah baratnya. Daya Tarik Wisata Tanah Lot merupakan tempat wisata yang terkenal dengan pemandangan alam laut selatan Bali dengan ombaknya dan tebingnya yang khas. Tanah Lot ini juga terkenal dengan panorama alam saat matahari tenggelam (sunset).

Hasil dan pembahasan sesuai dengan apa yang ditemukan oleh peneliti berdasarkan hasil dari pengumpulan data yang berasal dari observasi, dokumentasi dan dari hasil melakukan wawancara dengan informan untuk dimintai keterangan terkait pengelolaan atau aktifitas di DTW (Daya Tarik Wisata) Tanah Lot. Pemilihan Inspektur sebagai informan karena informan ini memiliki informasi mengenai tata kelola Tanah Lot serta memiliki wewenang atas pemberian informasi seputar DTW Tanah Lot.

Tabel 1: Informan Wawancara pada Penelitian ini

No.	Informan	Keterangan
1.	Bapak Made Sumawa	Wakil Ketua Badan Pengelola DTW Tanah Lot (Bendesa Adat)
2.	Bapak Gede Urip Gunawan	Inspektur kabupaten Tabanan
3.	Bapak Wayan Sukariana	Anggota Badan Pengelola dan Kepala desa Beraban (Perbekel)
4.	Bapak Made Agustika	Kadiv umum dan kepegawaian Manajemen Operasional Tanah Lot
5.	Ibu Made Suartini	Kadiv pengembangan dan promosi Manajemen Operasional Tanah Lot

Sumber: Hasil Wawancara dan Observasi

Sebelum melakukan wawancara, peneliti meminta izin melakukan penelitian di Bakesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) kabupaten Tabanan agar peneliti dapat melakukan wawancara dengan informan serta mendapatkan dokumen yang terkait. Dokumen yang dimaksud seperti laporan keuangan, surat kerjasama atau surat legalitas yang diperoleh di BAKEUDA (Badan Keuangan Daerah) kabupaten Tabanan. Mengenai Tanah Lot atau yang terkenal dengan sebutan DTW (Daya Tarik Wisata) Tanah Lot ini memiliki Badan pengelola serta manajemen operasional. Badan pengelola DTW Tanah Lot merupakan badan yang memiliki wewenang penuh atas DTW Tanah Lot. Badan pengelola ini membentuk manajemen operasional yang dimana berfungsi mengelola operasional DTW Tanah Lot. Badan pengelola tersebut dipimpin oleh seorang Ketua Umum dalam hal ini Bupati Tabanan. Manajemen operasional DTW Tanah Lot dipimpin oleh seorang manajer yang ditunjuk oleh Badan pengelola. Di dalam Manajemen Operasional yang bekerja disana hanyalah orang - orang asli beraban dari manajer hingga staf. Hal ini dilakukan untuk menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar karena Objek Wisata religius ini berada di wilayah desa Pakraman Beraban.

3.1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum

Akuntabilitas kejujuran ini tentu penting agar terciptanya tata kelola atau praktik yang sehat dan terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan. Pertanggungjawaban atau akuntabilitas kejujuran di dalam Daya Tarik Tanah Lot ini tercermin oleh tindakan seorang pengurus di dalam Badan pengelola bertanggungjawab secara jujur terkait dokumen internal.

“eee begini ga bisa, bukan eee dalam artian kita tutupi tidak, tetapi karena kami berada dibawah bupati, karena kami kan berada dibawah bupati jangan sampai loo bendesa adat ini gimana ni bendesa adatnya ga bisa koordinasi sama kami yaa” (Made Sumawa)

Seperti apa yang disampaikan oleh bapak Made Sumawa di atas, bapak tersebut selaku Wakil Ketua Umum 3 Badan Pengelola tidak seenaknya memberikan dokumen internal walaupun itu sebenarnya dapat diberikan. Dia lebih menekankan kepada komunikasi yang terjalin antar pengurus khususnya kepada Ketua Umum selaku atasannya. Hal ini juga mencerminkan adanya upaya dari informan ini untuk menerapkan praktik yang sehat serta jujur di dalam suatu organisasi. Sikap Made Sumawa diatas itu mencerminkan pula bapak Made Sumawa tidak ingin terjadi sebuah masalah khususnya antar sesama pengelola. Beliau ingin agar hubungan antar pengelola itu terjalin dengan harmonis. Bapak Made Sumawa sadar akan posisi dia di dalam struktur pengelolaan dan menghormati pengelola lainnya yang memiliki wewenang yang lebih tinggi. Ini menggambarkan bahwa salah satu konsep *Tri Hita Karana* yaitu; konsep *pawongan* yang di terapkan di dalam dirinya. Bovens (2007) sebuah akuntabilitas individu atau perseorangan di saat setiap pejabat memiliki tanggung jawab secara proporsional atas kontribusi dari dirinya yang berdampak kepada perilaku organisasi yang buruk.

Mengenai akuntabilitas dari sisi hukum dari Badan pengelola DTW Tanah, ternyata Badan Pengelola ini terbentuk dari sebuah perjanjian atau perikatan antara desa Pakraman Beraban dengan pemerintah Kabupaten Tabanan. Seperti yang dilontarkan oleh bapak Made Sumawa:

“Yang menjadi pengelola itu adalah eee ketua umum itu adalah bupati, bendesa adat itu dia bercokol di ketua 3 wakil ketua 3. Nah tentunya di dalam hal ini menyangkut dari pada pertanggungjawaban itu karena didalam perikatan itu sudah jelas jelas ada regulasi aturan main begitu antara desa pakraman dan pemerintah daerah” (Made Sumawa)

Hal yang sama juga diungkapkan pada saat wawancara dengan bapak Wayan Sukariana dan Made Agustika:

“Kalau pertanggungjawaban dari segi hukumnya sah sudah. Itu sudah ada keputusan bupati karena objek itu dikelola atas keputusan bupati keluar sudah SK bupati itu dibekerja samakan pemerintah daerah tingkat 2 tabanan bekerja sama dengan desa pekraman beraban gitu judulnya” (Wayan Sukariana)

“Pemerintah daerah dan desa pekraman. Jadi itu dulu, payung hukum perikatan berupa perjanjian antara pemerintah dan desa. Setelah kita sepakat mengelola maka dibentuklah badan operasional. Jadi badan itu diketuai oleh bupati langsung” (Made Agustika)

Pertanggungjawaban atau akuntabilitas DTW Tanah Lot dari sisi legalitas atau hukumnya itu berdasarkan surat kesepakatan atau perjanjian antara desa pakraman Beraban dengan pemerintah Kabupaten Tabanan. Kedua belah pihak inilah yang sekarang mengelola DTW Tanah Lot tersebut dan kemudian membentuk Manajemen Operasional untuk mengelola Objek wisata religius ini. Bovens (2007) akuntabilitas hukum biasanya akan didasarkan pada tanggung jawab khusus, baik secara formal maupun legal yang diberikan kepada pihak berwenang. Oleh karena itu, akuntabilitas hukum adalah jenis akuntabilitas yang paling tidak ambigu karena pengawasan hukum akan didasarkan pada standar hukum terperinci yang ditentukan oleh undang-undang sipil, pidana atau administratif. Pengakuan dari Made Sumawa di atas menunjukkan bahwa beliau taat akan aturan yang ada di dalam melakukan pengelolaan.

Made Sumawa yang menyatakan bahwa aturan yang ada sudah jelas terkait pertanggungjawaban hukumnya. Hal ini mencerminkan bahwa pihak pengelola menjaga hubungan yang baik dengan manusia (*pawongan*) karena di dalam melakukan sebuah tindakan mereka taat dengan aturan - aturan yang ada. Pengelola tidak seenaknya melakukan pengelolaan yang melanggar sebuah regulasi - regulasi yang ada. Kemudian pengakuan dari Bapak Sukariana yang sempat menyampaikan bahwa pengelolaan tersebut berdasarkan aturan dari pihak pemerintah terkait sisi legalitasnya. Pengakuan ini juga mengindikasikan bahwa para pengelola tidak ingin bertindak yang melanggar aturan atau hukum. Mereka tidak ingin terjadi sebuah masalah di kemudian hari karena di dalam melakukan pengelolaan tidak taat akan aturan. Perilaku ini menunjukkan bahwa pengelola ingin menjadi agar kehidupan antar sesama (*pawongan*) itu tetap terjalin dengan rukun.

Selanjutnya Made Agustika menyampaikan bahwa adanya sebuah kesepakatan di dalam tersusunya badan operasional yang berfungsi mengelola Tanah Lot. Kesadaran dari Made Agustika ini menunjukkan bahwa pihak - pihak pengelola tidak bersikap angkuh, egois yang mementingkan kepentingan kubu atau kelompok tertentu. Mereka ingin agar adanya sebuah keputusan yang saling dapat menerima. Sikap ini memperlihatkan bahwa pihak - pihak yang mengelola Tanah Lot mengamalkan konsep *pawongan* yang menekankan kepada kehidupan yang indah, harmonis, saling mengerti antar manusia. Pengelolaan Tanah Lot ini sebenarnya dulu juga dikelola oleh pihak swasta akan tetapi karena masalah biaya serta juga pengelolaan yang dilakukan oleh pihak swasta ini bukan untuk kepentingan bersama dan bukan untuk kesejahteraan bersama maka pihak swasta ini dikeluarkan dari kepengurusan, selain itu dengan adanya pihak ketiga juga akan membebani dari sisi *cost* (biaya) serta pihak ketiga ini tidak juga kurang memberikan kontribusi yang dimana ini disampaikan oleh bapak Made Sumawa:

“ditahun 2011 kan ada peninjauan karena pihak ketiga itu tidak terlalu memberikan kontribusi kepada apa namanya eee pengelolaan itu sendiri terpaksa kita hapus itu. Kalau masuk pihak ketiga secara otomatis costnya ada disitu sehingga 2011 itu kita cut lah pihak ketiga, sehingga ditahun 2011 keatas ini sampai 2026 itu 15 tahun eee itu antara 2 pihak saja desa pakraman dan pemerintah daerah itu” (Made Sumawa)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Wayan Sukariana yang dimana pihak ketiga ini mengelola bukan semata mata untuk kesejahteraan bersama tapi untuk kepentingan perseorangan.

“Tanah lot karena berada dikawasan desa pekraman tanah lot itu diberikan desa itu untuk ikut mengelola dan menikmati hasilnya yang ada dikawasan tanah lot sehingga itulah yang dijadikan pedoman oleh desa pekraman untuk maju merebut itu mengeluarkan pihak ketiga karena pihak ketiga itu kan menguntungkan pribadi dia, sedangkan kita pihak desa mengelola bukan untuk kepentingan pribadi untuk membangun desa” (Wayan Sukariana)

Karena pihak ketiga tersebut dirasa kurang tepat masuk di dalam kesepakatan tersebut dari adanya pertimbangan pertimbangan dari sisi keadilan, kesejahteraan, biaya (*cost*) maka dari tahun 2011 pihak ketiga tidak lagi dilibatkan di dalam pengelolaan DTW Tanah Lot. Pengakuan dari Made Sumawa perihal peninjauan yang akhirnya berujung pada pengeluaran pihak ketiga atau pihak pribadi di dalam struktur pengelolaan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa bukan untuk pribadi. Sikap ini memperlihatkan bahwa tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat luas bukan lebih kepada kesejahteraan individu. Sikap ini pula menjadi sebuah realitas dari konsep *pawongan*. Harmonisasi antar manusia dalam skala yang luas di tekankan pada konsep ini. Harmonisasi disini bukan hanya untuk satu individu akan tetapi kepada orang banyak. Wayan Sukariana juga menyampaikan hal yang serupa, pernyataan beliau mengindikasikan bahwa tujuan mengelola diperuntukan untuk sesama (manusia). Konsep *pawongan* ini terdapat pada dirinya yang terlihat dari penekannya akan pentingnya pengelolaan dilakukan oleh pihak desa karena akan berdampak kepada masyarakat luas yang akan menjadi lebih sejahtera serta tujuan dari pengelolaan itu pula agar kedepannya desa dapat lebih maju serta berkembang.

3.2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses yang menekankan kepada prosedur yang dilakukan oleh Manajemen Operasional Daya Tarik Wisata Tanah Lot didalam beroperasi. Peneliti melihat bahwa pengelola di dalam bekerja sudah baik dan sungguh - sungguh, salah satu contohnya *checker* didalam DTW Tanah Lot ini yang berfungsi untuk mengecek tiket dari setiap pengunjung Tanah Lot. *Checker* berkerja dengan baik dalam artian benar benar mengecek tiket yang dibawa oleh pengunjung. Apabila pengunjung tidak membawa tiket maka *checker* tidak akan mengizinkan

pengunjung untuk masuk. Seperti yang dialami oleh peneliti, dimana hasil dari observasi peneliti yang secara sengaja mencoba memberikan karcis parkir ditempat lain dan bukan tiket masuk, *checker* pun cukup tegas dan meminta tiketnya. Sempat berdiam sebentar sembari mengambilkan tiket yang sebenarnya didalam tas, peneliti setelah itu baru diizinkan masuk oleh *checker*. Akuntabilitas dalam hal tindakan dan aktifitas yang dilakukan oleh pengelola juga sesuai seperti yang disampaikan oleh Made Sumawa:

“dan disitu orang beli tiket kalau penjual tiketnya main main hati – hati. Kenapa? Itu akan diplong di pintu berikutnya. Tamu itu setelah dia beli tiket di tiket dia harus bawa sobekannya itu akan di plong ada tempat pengeplongan” (Made Sumawa)

Penjual tiket di dalam bekerja akan sulit untuk melakukan tindakan tindakan yang tidak sesuai prosedur karena tiket yang diperoleh oleh pengunjung akan diplong atau dilubangi sebagai tanda bahwa tiket itu sudah sesuai serta sebagai syarat untuk masuk ke dalam. Selain itu para pengunjung juga tidak bisa seenaknya masuk tanpa membeli tiket karena terdapat pintu yang harus memperlihatkan tiket agar bisa masuk ke area Pura. Pengakuan dari Made Sumawa di atas mencerminkan bahwa bagian tiket akan sulit untuk melakukan tindakan yang buruk perihal penjualan tiket. Pernyataan dari Made Sumawa tersebut mengindikasikan bahwa adanya sebuah upaya dari pihak pengelola agar adanya sebuah tindakan yang jujur dan tidak merugikan masyarakat. Ini menunjukkan sebuah tindakan yang mengarah kepada sebuah pengamalan konsep *parahyangan* yang mengedepankan harmonisasi dengan sang pencipta dengan bertindak dengan jujur. Bertindak dengan jujur merupakan sebuah tindakan yang patut dilakukan walaupun mungkin dapat tidak diketahui oleh manusia lain akan tetapi tidak dapat membohongi sang pencipta.

Akuntabilitas yang terkait dengan proses, aktifitas yang dilakukan oleh manajemen operasional DTW Tanah Lot yaitu harga yang dibebankan kepada pengunjung yang sudah sesuai dengan harga yang sudah diatur di internal manajemen operasional. Hasil observasi peneliti yang secara langsung membayar tiket masuk saat berkunjung kesana menunjukkan kesesuaian antara harga yang diatur di internal dengan harga yang sebenarnya dibebankan ke pengunjung (dokumen terlampir). Menurut Mardiasmo (2002) pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya *mark up* dan pungutan - pungutan lain di luar yang ditetapkan. Fakta ini menunjukkan bahwa bagian tiket pada manajemen operasional ini sudah bertindak sesuai dengan aturan yang dimana peneliti dibebankan biaya Rp 20.000/orang sebagaimana yang tercantum di dalam brosur Tanah Lot yang didapatkan oleh peneliti dari salah satu informan (brosur terlampir) serta pengelola tidak melakukan *mark up* harga yang dapat merugikan pengunjung atau masyarakat. Salah seorang informan juga sempat menyatakan hal yang terkait dengan harga masuk dari DTW Tanah Lot:

“tapi secara kasarnya dapat tiang (saya) katakan itu domestik anak anak. Yang domestik anak anak itu eeee 15 ribu, terus yang dewasa 20 ribu. Untuk yang asing anak anak ituu 30 ribu, yang asing dewasa itu 60 ribu” (Made Agustika)

Salah seorang informan yaitu Made Agustika menyampaikan bahwa harga yang dikenakan untuk satu orang domestik lokal sebesar Rp 20.000 yang sempat terekam melalui hasil wawancara dengan peneliti. Hal ini sesuai dengan dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti serta hasil observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti yang dimana peneliti seakan akan menjadi pengunjung Tanah Lot. Berdasarkan pernyataan diatas terdapat sebuah diskriminasi harga antara domestik dan asing. Ini menunjukkan perilaku dari pengelola yang mengamalkan ajaran *Tri Hita Karana* khususnya konsep *parahyangan* yang menekankan kepada harmonisasi antar manusia dengan sang pencipta. Made Agustika menyampaikan sebuah informasi yang benar dan tidak berbohong terkait harga masuk ke DTW Tanah Lot. Perilaku Made Agustika ini mencerminkan sebuah rasa kejujuran, cinta terhadap sebuah kebenaran dari tindakan yang dilakukannya sendiri. Made Agustika sebagai umat beragama yang yang bernaung dibawah lindungannya maka harus bertindak sesuai ajaran - ajaran dharma (kebaikan) salah satunya yaitu bertindak dengan jujur.

3.3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program yang dimana akuntabilitas ini menekankan pada sebuah program, sebuah upaya dari pengelola untuk merealisasikan visi serta misi yang tujuannya agar memberikan sebuah *feedback* yang bermanfaat bagi masyarakat. Akuntabilitas program yang dilakukan oleh pengelola Daya Tarik Wisata (DTW) Tanah Lot ini mencakup program pengembangan serta program promosi. Program pengembangan itu terkait dengan infrastruktur yang ada disepertaran area objek wisata Tanah Lot. Hal hal yang dilakukan misalkan melakukan pembenahan di *Tall Gate* (tempat pengunjung membeli tiket), pemebenahan gedung milik *checker* yang dimana tentu ini bertujuan untuk membuat para pengelola lebih nyaman didalam bekerja. Pemappingan juga dilakukan agar perkiran terlihat lebih rapi dan pengunjung nyaman untuk berkunjung kesana, selain itu pengelola juga paham akan pentingnya lahan parkir yang dimana ini menjadi salah satu titik penting didalam infrastruktur Tanah Lot, hal tersebut disampaikan oleh Made Agustika:

“pemappingan diparkiran karna parkir itu tanah pribadi jadi kita sewa. Karena kita kekurangan lahan parkir disini jadi kita join dengan pihak pribadi kita paping itu, itu termasuk program pengembangan itu” (Made Agustika)

Bapak Made Sumawa juga menyampaikan hal yang sama:

“Itu kita sampai nyewa karena membeludak, dulu karena tanpa ada backupan parkir – parkir cadangan kalau macetnya ditahun baru itu sampai di pandak gede itu yang diujung utara itu”
(Made Sumawa)

Pengelola sampai menyewa lahan parkir karena terdapat kekurangan parkir akibat dari tingginya jumlah pengunjung di Tanah Lot. ini menunjukkan bahwa program pengembangan yang dilakukan oleh pengelola tentu untuk tujuan kenyamanan dari masyarakat yang berkunjung kesana. Made Agustika sadar akan pentingnya lahan yang digunakan untuk membuat parkir yang merupakan salah satu dari program pengembangan yang dilakukan.

Made Agustika menyampaikan bahwa lahan tersebut disewa oleh pihak pengelola karena kekurangan lahan untuk parkir. Perilaku pengelola yang menyewa lahan tersebut untuk kenyamanan dari pengunjung merupakan cara mereka untuk menjaga sebuah harmonisasi kehidupan dengan sesama manusia (*pawongan*). Pengunjung dapat merasa nyaman dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak pengelola karena masalah lahan parkir telah ditindaklanjuti oleh pihak pengelola.

Pengakuan dari Made Sumawa serupa dengan apa yang dikatakan oleh Made Agustika bahwa pihak pengelola sampai rela menyewa lahan. Pihak pengelola membuat sebuah parkir cadangan yang sewaktu waktu berguna karena apabila tidak memiliki parkir cadangan maka kemacetan parah pun akan terjadi di waktu waktu tertentu dan tentu akan membuat masyarakat kurang nyaman, maka program pengembangan dari pembuatan serta penataan lahan parkir ini penting yang dimana diperuntukan untuk kemakmuran masyarakat yang khususnya bagi para pengunjung. Pengakuan dari Made Sumawa ini menunjukkan bahwa pihak pengelola menjaga harmonisasi antar sesama manusia khususnya kepada wisatawan dan juga harmonisasi dengan alam sekitar. Ini merupakan pengakuan dari sebuah pengamalan konsep (*pawongan*) dan (*palemahan*) yang dilakukan oleh para pengelola.

Pertanggungjawaban program yang dilakukan oleh pengelola Tanah Lot juga dengan cara melakukan rapat rapat yang dilaksanakan dalam kurun waktu setahun baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat tidak rutin. Seperti yang disampaikan oleh Made Agustika:

“iyaaa, tapi rapat badan rutin itu, rapat badan yang bersifat tidak rutin bisa sewaktu – waktu. Tapi untuk rapat rutin itu diawal tahun, kita merancang program dan sekaligus kita mempertanggungjawabkan apa namanya operasional kita ditahun sebelumnya, sekaligus kita mempresentasikan program – program kita ditahun yang sekarang” **(Made Agustika)**

Salah seorang informan yaitu bapak Made Sumawa juga berkata demikian:

“Kalau pertanggungjawabannya tetap di badan pengelola karena setiap tiga bulan sekali ada rapat badan pengelola bertanggungjawab dari apa yang ada” **(Made Sumawa)**

Para pengelola bertanggungjawab atas program program yang mereka laksanakan dengan mengadakan rapat yang tujuannya untuk membuat sebuah perencanaan program program yang akan dilakukan dalam kurun waktu satu tahun ke depan. Para pengelola

melakukan perencanaan ini agar program program yang dilakukan kedepannya dapat terlaksana dengan benar. Bukan hanya program yang akan dilakukan akan tetapi program yang tahun lalu juga dibahas di dalam rapat tersebut. Upaya yang dilakukan oleh pihak pengelola dengan melakukan rapat seperti apa yang dikatakan dan disadari oleh Made Agustika dan Made Sumawa bahwa pihak pengelola melakukan rapat secara periodik dengan membahas hal - hal yang sudah dilakukan ataupun hal - hal yang akan dilakukan. Ini menunjukkan sikap tanggungjawab terhadap masyarakat. Upaya ini menunjukkan sebuah konsep *pawongan* dari pengelola. Pengelola serius di dalam melakukan pengelolaan dengan harapan agar kekurangan - kekurangan yang ada dapat diperbaiki, dapat mengelola lebih baik ke depannya serta agar dapat meminimalisir kesalahan - kesalahan yang dapat merugikan masyarakat luas. Kemudian para pengelola di dalam melaksanakan rapat tersebut, mereka membahas keluhan keluhan dari masyarakat terutama *guide guide* yang mengantarkan wisatawan ke objek wisata Tanah Lot. Bapak Made Sumawa sempat menyampaikan di dalam wawancara dengan beliau:

“kami kira disitu menyangkut dari pada kunjungan meningkat atau tidak, yang kedua apa yang semestinya kita lakukan dibulan bulan berikutnya. Itu ada suatu kadang kadang masalah yang muncul, kalau masalah yang muncul disini kan ada masukan masukan dari pada guide. Kita ditampung oleh operasional ini seperti yang kemarin permasalahan diparkirnya” (Made Sumawa)

Salah satu masalah yang ada terkait dengan lahan parkir, maka para pengelola menindaklanjutinya dengan mengadakan rapat yang berfungsi agar masalah ini terselesaikan. Pengakuan dari Made Sumawa diatas juga mencerminkan adanya upaya dari pihak pengelola untuk tetap menjaga harmonisasi, ketentraman antar sesama umat manusia. Ini dapat di maknai bahwa pengamalan konsep *pawongan* itu di lakukan oleh pihak pengelola. Itu tercermin dari pernyataan yang sempat menyampaikan bahwa mereka menindaklanjuti keluhan dari para *guide*. Ini merupakan kesadaran dari pihak pengelola agar hubungan yang harmonis tetap selalu terjalin dan juga merupakan bentuk tanggungjawab dari para pengelola agar *guide* serta wisatawan yang hadir dapat merasa nyaman disaat berkunjung. Program pengembangan parkir ini menjadi wujud salah satu nilai nilai *Tri Hita Karana* yang dimana kaitannya harmonisasi antara manusia dengan manusia (*pawongan*) serta harmonisasi antara manusia dengan lingkungan (*palemahan*) yang menjadi acuan di dalam mengelola serta mengembangkan Tanah Lot ini.

Bentuk ataupun perwujudan dari konsep *pawongan* yang menekankan harmonisasi antara manusia dengan manusia ini juga sempat terekam dari pernyataan Made Agustika:

“oleh karena objek wisata ini berdampingan dengan desa pekraman beraban itu kita berkomitmen bahwa karyawan kita adopsi 100% masyarakat beraban gtu” (Made Agustika)

“nahh itu dahh, salah satunya kalau dengan desa itu kita merekrut karyawan disini kan 100% orang masyarakat beraban” (Made Agustika)

Pengakuan Made Agustika diatas yang sempat menuturkan bahwa pihak pengelola memiliki komitmen untuk mengadopsi seluruh karyawan dari beraban. Pengakuan tersebut dapat menunjukkan bahwa pengelola memiliki sebuah usaha agar harmonisasi tetap terjaga khususnya untuk masyarakat beraban. Pengelola atau karyawan dari Manajemen Operasional Tanah Lot semuanya merupakan masyarakat asli desa Beraban. Ini menunjukkan bahwa adanya suatu kontribusi dari pihak pengelola terhadap masyarakat khususnya masyarakat Beraban. Konsep *pawongan* ini akan menghasilkan sebuah harmonisasi yang dimana akan adanya sebuah interaksi yang positif dan berdampak terhadap kesejahteraan, kemakmuran yang terutama ditujukan untuk masyarakat asli beraban. Selanjutnya konsep *palemahan* yang menitik beratkan pada harmonisasi antara manusia dengan lingkungan terwujud dalam bentuk yang lainnya. Seperti yang disampaikan oleh Made Agustika dan Made Sumawa:

“jadi kita disini kita ada aktivitas, aktivitas itu timbul sampah, limbah itu kita bekerja sama dengan DKP (dinas kebersihan provinsi). Kita disini ada pembuangan sementara TPS, setelah itu setiap hari itu diangkut, diangkut dibawa ke TP(tempat pembuangan) akhir” (Made Agustika)

“pariwisata itu tidak bisa dibangun sekali dinikmati selama lamanya, tidak bisa. Apalagi ada sembilan belas ribu (19.000) orang masuk setiap hari sudah bakal tentu dengan kedatangan orang itu dia akan berdampak kepada lingkungan, sehingga disitu perlu ada perbaikan – perbaikan” (Made Sumawa)

Pernyataan yang disampaikan oleh Made Agustika diatas yang dimana para pengelola melibatkan pihak lain di dalam menjaga lingkungan sekitar mereka. Mereka memiliki inisiatif untuk membuat TPS agar memudahkan di dalam melakukan pengelolaan alam sekitar. TPS ini yang akan membantu pihak - pihak yang bertugas misalkan melakukan distribusi sampah ke tempat pembuangan akhir. Komitmen akan terciptanya suatu lingkungan yang tetap terjaga keasriannya bukan hanya dari Made Agustika akan tetapi juga di sampaikan oleh Made Sumawa. Seperti yang dikatakan oleh Made Sumawa *‘pariwisata itu tidak bisa dibangun sekali dinikmati selama lamanya, tidak bisa’* kesadaran dari Made Sumawa ini menunjukkan bahwa pengelola paham perlunya keberlanjutan di dalam menjaga, melestarikan lingkungan sekitar. Maka dari itu perlu melakukan penataan, perbaikan, pembersihan lingkungan agar tetap menjaga areal sekitar serta ini menjadi sebuah pengamalan akan konsep *palemahan* itu sendiri.

Ajaran *Tri Hita Karana* ini juga menekankan hubungan manusia dengan sang pencipta (*parahyangan*). Hal yang dilakukan oleh para pengelola tentunya melakukan upacara - upacara pada hari hari tertentu agar tetap menjaga interaksi yang positif dengan sang pencipta. Seperti yang terekam di dalam sebuah pernyataan yang serupa dari hasil wawancara dengan Made Sumawa dan Made Agustika:

“tatkala ada upacara dipura ini dari operasional itu tenaganya juga harus dipakai disitu membuat penjor dan lain sebagainya, itu kan hubungan antara manusia dengan tuhan” (Made Sumawa)

“setiap kita membangun kita pasti mengacu pada parahyangan itu kita tetap mengadakan banten kan tetap itu” (Made Agustika)

Pada saat upacara pengelola dari Manajemen Operasional juga ikut turut di dalam melancarkan upacara tersebut. Pengelola ikut terlibat didalam upacara salah satunya membuat penjor, ataupun kelengkapan upacara lainnya. Pengakuan Made Sumawa diatas yang menyampaikan bahwa tenaga karyawan harus dipakai di saat adanya sebuah persembahyangan itu menunjukkan bahwa sikap yang berbakti terhadap sang pencipta. Pihak pengelola menghabiskan waktu untuk membantu agar upacara yang akan dilaksanakan berjalan dengan lancar. Itu merupakan sebuah pengamalan oleh pengelola di dalam konsep *parahyangan* yang kaitannya dengan hubungan manusia dengan sang pencipta. Melalui pengabdian di dalam membantu upacara yang akan dilaksanakan itu sekaligus mencerminkan pengabdian yang ditujukan terhadap sang pencipta. Sedangkan penuturan Made Agustika yang menyampaikan bahwa mereka selalu membuat banten merupakan cerminan bahwa pengelola ingat kepada sang pencipta. Ini merupakan salah satu bentuk juga adanya interaksi antara manusia dengan sang pencipta, tentu diharapkan dengan memberikan banten atau sesajen maka hubungan yang harmonis pun akan terjalin. Pembuatan banten itu juga memperlihatkan bahwa pihak pengelola sadar akan pentingnya sebuah tindakan spiritual yang ditujukan kepada sang pencipta. Banten tersebut merupakan wujud cinta kasih manusia yang selalu bersyukur akan karunia yang diberikan oleh sang pencipta.

Selanjutnya Made Agustika menyampaikan hal lainnya terkait dengan konsep *parahyangan*:

“misalnya pembangunan toilet gitu misalnya kita disini kan tidak terlepas ada kawasan suci dimana mana saja daerah yang bisa kita banguni bangunan itu” (Made Agustika)

“tri sandya nya? iyaaa, enggak. Siang sama sore karena kan baru bukanya jam 7 jam 7 pagi, pukul 12 sama sore jam 6. (Made Agustika)

Pengelola didalam melakukan pembangunan juga tidak sembarang tempat dapat dibuatkan toilet. Oleh karena itu para pengelola harus memperhatikan titik titik mana saja yang dapat dibangun toilet di areal sekitar Tanah Lot. Made Agustika menyampaikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak sembarang. Pengelola berhati - hati di saat menjalankan proram infrastruktur misalkan pembangunan toilet. Made Agustika secara smenyampaikan bahwa harus memiliki sebuah pertimbangan di saat ingin membangun karena terdapat kawasan suci di sekelilingnya. Kesadaran dari Made Agustika ini menunjukkan bahwa masih teringat akan hal - hal spiritual yang erat kaitannya dengan hubungan dengan sang pencipta

(*parahyangan*). Kesadaran dari Made Agustika ini juga menunjukkan bahwa pengamalan dari konsep *parahyangan* itu dilakukan oleh pihak pengelola.

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Manajemen Operasional mempertanggungjawabkan dana yang mereka kelola dengan menyusun laporan keuangan (dokumen terlampir) setiap bulannya, hal ini menunjukkan sebuah akuntabilitas keuangan. Menurut Mardiasmo (2002) akuntabilitas keuangan mengharuskan lembaga - lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja *financial* organisasi kepada pihak luar. Pengelola bertanggungjawab kepada berbagai pihak mulai dari pihak pemerintah, pihak desa Beraban, Pura Tanah Lot, Pura - pura lain disekitar kawasan serta kepada desa se-kecamatan kediri. Berdasarkan dokumen laporan keuangan serta dokumen legalitas yang diperoleh terlihat juga bahwa pihak pemerintah memiliki porsi yang paling besar di dalam pembagian hasil yang berasal dari pendapatan bersih Manajemen Operasional Tanah Lot. Pihak pemerintah disini mendapatkan porsi yang paling besar diantara pihak - pihak lainnya karena pemerintah daerah Tabanan yang memiliki lahan parkir, kemudian kios - kios atau pasar yang menjual berbagai macam souvenir, menjual makanan, dll itu milik pemerintah daerah. Oleh karena pertimbangan - pertimbangan tersebut maka pihak pemda lah yang diberikan porsi paling besar.

Selanjutnya pertimbangan porsi yang diberikan kepada Pura yang berada di kawasan tersebut antara lain dari sisi daya tarik serta luas wilayah Pura. Pura Tanah Lot menjadi Pura yang paling besar mendapatkan persentasi pembagian hasil dibandingkan Pura lainnya. Hal ini dikarenakan daya tarik yang paling besar dimiliki oleh Tanah Lot itu sendiri. Sedangkan untuk desa Beraban karena berada di wewidangan (wilayah) desa Beraban maka persentase yang disepakati untuk Beraban cukup besar yang dimana setelah persentase dari pemerintah daerah. Manajemen Operasional bertanggungjawab kepada Badan Pengelola didalam melakukan aktifitas yang ada kaitannya dengan keuangan mereka. Made Agustika serta Made Sumawa sempat melontarkan hal yang sama:

“misalkan tahun ini kita mau menambah karyawan itu itu ke badan kan ngomongin masalah budget itu lagi tetap dibadan kita ajukan” (Made Agustika)

“yang jelas ke badan pengelola, pertanggungjawabannya disitu sudah dibuat namanya biaya promosi dan pengembangan” (Made Sumawa)

Pertanggungjawabannya kepada Badan Pengelola dan harus sepengetahuan Badan pengelola di dalam hal pengeluaran dana operasional yang dikelola. Manajemen Operasional tidak dapat seenaknya di dalam mengeluarkan dana dengan hanya mendapatkan otorisasi dari pihak keuangan ataupun internal lainnya. Seperti yang terekam dari disampaikan oleh Made Agustika bahwa terkait penganggaran (*budgeting*) harus diketahui oleh Badan pengelola selaku

badan yang membawahi Manajemen Operasional ini. Pengelola taat dengan aturan yang ada terkait tata kelola keuangan. Sikap tersebut dapat dimaknai bahwa pengelola bertindak sesuai aturan yang mengindikasikan bahwa pengelola tidak ingin mendapatkan suatu masalah karena melanggar aturan yang sudah ada. Sikap ini pula memperlihatkan bahwa mereka ingin menjaga hubungan mereka dengan pihak - pihak lain atau dengan sesama manusia (*pawongan*). Bayangkan apabila aturan tersebut di langgar maka sebuah kekacauan akan terjadi yang melibatkan manusia dengan manusia yang disebabkan karena ketidaktaatan akan sebuah regulasi yang sudah di susun.

Selain itu Made Agustika juga sempat menyampaikan:

“Ada RABT yang perlu di tambah atau di ubah. Jadi yang membuat rancangan anggaran itu kita dimanajemen kita ajukan ke badan, badan, kita rapat paling ada yang ditambahi, sehingga nanti diputuskan setelah fix baru diputuskan” (Made Agustika)

“Kita menyusun program dulu kita ajukan RAB itu disetujui kedua belah pihak dalam hal ini. Nanti kedua belah pihak, walaupun keputusan tertinggi itu di ibu di badan pengelola dalam hal ini bupati dari pihak desa kan tanda tangan dia” (Made Agustika)

Selain itu apabila rancangan anggaran yang diawal tahun sudah disepakati tiba - tiba di pertengahan tahun diperlukan dana tambahan ataupun ada perubahan misalnya dana pengembangan, promosi, gaji ataupun dana lainnya maka pihak Manajemen Operasional harus mengajukan serta meminta persetujuan dari Badan Pengelola yang dimana terdapat pihak kabupaten Tabanan dan desa adat Beraban yang harus sama sama sepakat. Tindakan ini kembali mencerminkan pihak pengelola yang taat akan aturan yang ada. apabila aturannya harus diajukan dulu di Badan maka mereka akan melakukan itu. Kemudian keputusan yang diambil adalah dengan persetujuan dari kedua belah pihak yang sama - sama memiliki wewenang. Sikap ataupun perilaku ini menggambarkan sebuah upaya, tindakan agar hubungan dengan manusia ataupun pihak lainnya tetap terjaga (*pawongan*). Pengelola bertindak sesuai dengan aturan serta juga tidak dapat egois atau sepihak di dalam pengambilan keputusan.

Pihak pengelola didalam mendistribusikan dana dari hasil pengelolaan objek wisata religius ini dengan cara melakukan transfer ke LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Beraban yang berlokasi didesa tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Made Sumawa:

“dari hasil pendapatan bruto telah dikurangi dengan biaya biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 maka para pihak sepakat mengatur hasil pembagiannya sebagai berikut: pemerintah kabupaten tabanan 60%, desa pakraman beraban 24%, pura luhur tanah lot 7,5%, pura – pura terkait dikawasan nah ini pura – pura yang ada disekitarnya itu karena itu yang menjadi daya tarik daripada pariwisata, dengan adanya pura tanah lot dengan pura disekitarnya itu daya tariknya sehingga dia bukan pantai saja. Kalau tanpa pura pantai saja ga sebegini dia anunya kunjungannya” (Made Sumawa)

Pengelola secara sadar menyepakati adanya pembagian hasil dari pengelolaan Tanah Lot yang diberikan ke dalam tiga kategori yaitu; pemerintah, desa beraban dan pura - pura yang ada di kawasan tersebut. Ini menunjukkan adanya rasa saling memiliki satu sama lain. Pihak pengelola menjaga hubungan mereka dengan pihak - pihak lainnya yang juga ada di sekitar Tanah Lot dengan cara membagi hasil pengelolaan tersebut dan bukan hanya dinikmati oleh pihak desa. Pengakuan dari Made Sumawa tersebut juga menunjukkan bahwa pengamalan konsep *pawongan* yang mengedepankan hidup tentram dan harmonis antar sesama manusia.

3.5. Transparansi

Pihak pengelola juga memiliki sebuah *website* yang dimana dapat diakses melalui (www.tanahlot.id). Peneliti mencoba membuka *website* tersebut dan terdapat informasi mengenai Tanah Lot yang antara lain cerita singkat tentang Tanah Lot, *event* atau program yang pernah dilakukan seperti video Tanah Lot *Creative food and Art Festival 2017* serta terdapat pula informasi mengenai jumlah kunjungan pertahun. Seperti yang disampaikan oleh Made Suartini:

"kalau itu pertama pasti kita sudah ininya sejarahnya itu misalnya dari awal seperti apa sejarahnya habis itu profilnya dari manajemen dan sampai juga fasilitas yang kita punya disini"
(Made Suartini)

"ee sampai daftar kunjungan tiap tahun eee di video event event yang pernah kita laksanakan"
(Made Suartini)

Pihak pengelola mempublikasikan informasi yang berkaitan dengan *event* yang sempat dilaksanakan serta sejarah mengenai Tanah Lot, akan tetapi pengelola tidak mempublis informasi mengenai keuangan mereka seperti pendapatan, biaya tidak terdapat pada *website* tersebut. Ini menunjukkan bahwa akses informasi yang dapat dimiliki oleh masyarakat itu terbatas di dalam hal hal tertentu saja tidak sampai kepada keuangan mereka. Padahal dengan adanya *website*, pihak pengelola dapat lebih memanfaatkan agar terciptanya sebuah kepercayaan dari masyarakat serta paling tidak menunjukkan terdapat upaya membangun tata kelola yang baik walaupun belum maksimal.

Pengakuan dari Made Suartini diatas memperlihatkan bahwa pihak pengelola sebenarnya sudah berusaha dan memiliki sebuah upaya agar bersikap transparan atau terbuka dengan masyarakat. Sikap ini pula menunjukkan bahwa pengamalan konsep *pawongan* itu sudah diterapkan. Akan tetapi pengamalan yang dilakukan belum maksimal. Hal tersebut terlihat dari upaya pihak pengelola untuk memberikan informasi yang mudah di akses oleh masyarakat, tindakan tersebut kaitannya kepada hubungan yang terjalin antar sesama manusia (*pawongan*). Pihak pengelola dengan memberikan informasi diharapkan masyarakat dapat lebih mempercayai hal - hal yang sudah di lakukan oleh pengelola serta meminimalisir stigma

yang terbentuk dari masyarakat. Pihak pengelola di dalam memberikan informasi masih terbatas pada hal - hal tertentu saja yang memperlihatkan bahwa ketidakmaksimalan di dalam upaya untuk menjaga kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Misalkan faktanya bahwa pengelola tidak melakukan publikasi terhadap kinerja keuangan mereka. Hal ini dapat membentuk opini yang kurang baik serta mengikis nilai - nilai di dalam konsep *pawongan* itu sendiri. Menurut Patrizia dan Massimo (2014) peningkatan transparansi pada organisasi *non profit* dan informasi yang lebih baik yang tersedia di internet akan semakin meyakinkan. Transparansi bekerja sebagai alat *trustbuilding*; organisasi menjadi lebih akuntabel dan transparan serta organisasi semakin bisa dipercaya dan akan dilihat oleh para *stakeholders*. Transparansi dapat menjadi sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk dapat meyakinkan masyarakat.

Pengelola juga melakukan sebuah rapat atau paruman desa khusus untuk membahas pengelolaan Tanah Lot. Ini juga merupakan cara mereka untuk memberikan informasi bagi masyarakat khususnya masyarakat desa beraban. Hal ini disampaikan Made Sumawa: “iyaa yang pertama itu 2001, 2026 nanti baru lagi ada pembahasan. Kalau paruman desa tentang tanah lot itu 2026 baru lagi” **(Made Sumawa)**

Hal yang mirip disampaikan oleh Wayan Sukariana: “belum pernah ada, ini masih perjanjian lama. Selama saya jadi perbekel ini belum pernah ada perubahan perjanjian” **(Wayan Sukariana)**

Paruman desa atau rapat desa yang khusus membahas mengenai Tanah Lot itu baru akan dilakukan kembali ditahun 2026 sesuai dengan masa berakhirnya perjanjian kerjasama yang sekarang telah berjalan dan sebelumnya disepakati. Statement bapak Made Sumawa diatas memperlihatkan bahwa masih ingat adanya sebuah tanggungjawab untuk melakukan sebuah pembahasan terkait pengelolaan Tanah Lot walaupun diadakan dalam rentang waktu yang cukup lama. Perilaku Made Sumawa ini memperlihatkan bahwa sebuah tanggungjawab akan pengelolaan yang dilakukan. Hal ini dilakukan agar hubungan antar pihak - pihak yang berwenang tetap terjalin dengan baik. Sikap seperti ini terkait dengan konsep *pawongan* yang menekankan kepada sebuah upaya kesadaran agar menjaga hubungan yang tentram, damai dengan masyarakat luas.

Menurut Gede Urip ada hal yang juga harus dibenahi oleh pihak pengelola agar tata kelola mereka lebih baik lagi.

“Tata kelola pengadaan itu penting untuk dibuat lembaga yang lebih baik sehingga pengadaan lebih transparan lebih bisa eee apa namanya memberi kesempatan kepada berbagai penyedia untuk ini secara fair. Kalau sekarang itu masih belum belum transparansinya eee apa namanya belum maksimal. Itu yang penting ee terus rencana ini akan ada apa namanya checker jadi tiketnya tidak manual seperti sekarang, sekarang kan manual” **(Gede Urip)**

Bapak Inspektur menyatakan bahwa tender yang dilakukan oleh pihak pengelola belum maksimal, dan ada harapan agar kedepannya pengadaan yang dilakukan oleh baik lagi yang mungkin dapat dilakukan dengan sistem *e-tendering* yang lebih terbuka dan turut meningkatkan sisi transparansi. Pengakuan dari Gede Urip ini yang memfokuskan kepada sebuah transparansi yang dilakukan oleh pihak pengelola. Menurut pengakuan beliau, transparansi masih kurang dan perlu pembenahan. Makna yang terkandung tentu diharapkan pengelola Tanah Lot lebih membenahi tata kelola mereka yang akan berdampak kepada meningkatnya kepercayaan dari berbagai pihak. Kemudian diharapkan hubungan yang terjalin akan lebih baik lagi karena upaya untuk meminimalisir kesalahan, kekeliruan tercermin dari tindakannya kelak. Apabila masyarakat sudah memiliki kepercayaan akan pengelolaan yang dilakukan maka akan memelihara serta meningkatkan hubungan harmonis antara pihak pengelola dengan pihak - pihak yang berkaitan (*pawongan*).

Kemudian tiket yang masih manual juga sempat disinggung yang dimana kedepannya pihak pengelola akan lebih baik menggunakan *e-ticketing*, yang dimana ini juga dapat membuat sebuah tata kelola yang lebih baik serta lebih tranparan. Akan tetapi pihak pengelola juga belum mengetahui pasti terkait sistem *e-ticketing* ini, seperti yang disampaikan oleh Made Suartini disaat wawancara serta bapak Ketut Toya Adnyana selaku Manajer Manajemen Operasional yang disampaikan lewat media massa yaitu Bali Express:

"kita juga gitu dah menunggu dari bupati kebetulan ketua umumnya istilah menunggu dari beliau kapan bisa diterapkan kalau tempat sih sudah sudah kita siapkan" (**Made Suartini**)

"Untuk program tiket elektronik kami masih menunggu kelanjutan dari Ketua Umum Badan Pengelola" (**Ketut Toya Adnyana**)

4. Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran

Akuntabilitas di Daya Tarik Wisata (DTW) Tanah Lot ini secara keseluruhan dapat saya katakan cukup baik. Seperti yang ditemukan oleh peneliti bahwa akuntabilitas yang dilakukan oleh para pengelola sudah terdokumentasi, selanjutnya juga akuntabilitas yang dilakukan merujuk kepada pengamalan ajaran Karma Phala dan Tri Hita Karana yang dimana para pengelola bertindak dengan jujur serta tetap menjaga keharmonisan antar manusia dengan sesama, alam serta sang pencipta. Kemudian pihak pengelola sebenarnya sudah memiliki website yang dimana memberikan informasi seputar Tanah Lot. akan tetapi hal yang dipublikasikan belum maksimal yang dimana informasi yang dipublis juga masih terbatas. Secara keseluruhan dari akuntabilitas yang dilakukan oleh pihak pengelola sudah cukup baik dari program yang dijalankan. Akan tetapi terkait akuntabilitas keuangan serta transparansi terkait keuangan mereka yang masih kurang khususnya bagi pihak eksternal. Selain itu pihak

eksternal yang ingin mendapatkan informasi atau dokumen keuangan harus meminta izin serta menghadapi birokrasi di pemerintahan yang cukup memakan waktu.

Keterbatasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Peneliti tidak dapat bertemu serta wawancara dengan Kadiv Perencanaan dan Keuangan Manajemen Operasional DTW Tanah Lot karena beliau tidak bersedia diwawancarai sehingga informasi keuangan yang didapatkan oleh peneliti terbatas. Peneliti di saat ingin memperoleh data seperti Laporan Keuangan, Surat Perikatan harus melewati berbagai birokrasi dipemerintahan sehingga memakan waktu yang lebih lama. Atas dasar dari keterbatasan dari penelitian ini, maka arahan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: Peneliti selanjutnya diharapkan harus memastikan terlebih dahulu bahwa informan - informan yang rencananya akan di wawancarai bersedia di wawancara agar data yang diperoleh lebih maksimal. Peneliti selanjutnya sebaiknya memiliki koneksi, kenalan seseorang yang bekerja di pemerintahan agar pada saat pengumpulan data dapat lebih cepat serta waktu penyelesaian penelitian dapat lebih cepat.

Daftar Pustaka

- Adiloglu, B & B, Vuran. (2012). The Relationship between the Financial Ratios and Transparency Levels of Financial Information Disclosures Within The Scope of Corporate Governance: Evidence from Turkey. *The Journal of Applied Business Research* ,Vol. 28, No. 4, pp.543-554.
- Basuki, (2016). *Metode Penelitian Akuntansi Dan Manajemen Berbasis Studi Kasus*. Surabaya; Airlangga University Press.
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European law journal*, 13(4), 447-468.
- Bovens, M. (2010). Two Concepts of Accountability: Accountability as a Virtue and as a Mechanism. *West European Politics*, 33(5), 946-967.
- Carroll, A. B. (1991) The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders, *Business Horizons*, July–August.
- Darmada, D. K., Atmadja, A. T., & Sinarwati, N. K. (2016). Kearifan Lokal Pade Gelahang Dalam Mewujudkan Integritasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Subak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 51-60.
- Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Bali. *10 Besar Kunjungan Objek Wisata di Bali Th 2016*. <http://www.disparda.baliprov.go.id/id/Statistik3>.
- Gelfand, M J , B Lim & J L Raver. (2004). Culture And Accountability In Organizations: Variations In Forms Of Social Control Across Cultures. *Human Resource Management Review*, Vol 14, hlm 135–160.
- <https://www.jawapos.com/baliexpress/read/2018/01/13/40102/penerapan-e-ticketing-di-dtw-tanah-lot-masih-gabeng>.
- Kumalasari, D. (2017). Transparansi dan Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(11).

- Lestari, P.F.K.L., W. Windia, & N.W.S Astiti,. (2015). Penerapan Tri Hita Karana untuk Keberlanjutan Sistem Subak yang Menjadi Warisan Budaya Dunia: Kasus Subak Wangana Betan, Kecamatan Penebel. Kabupaten Tabanan. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, Vol. 4, No.1, hlm 1-12.
- Mandarin, I. K. S., Atmadja, A. T., & Herawati, N. T. (2017). Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada sistem dana punia Pura Goa Giri Putri di Desa Pakraman Karang Sari, kecamatan Nusa Penida, kabupaten Klungkung. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1)*, 7(1).
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2 : 1. (1-17).
- McGee, R., & Gaventa, J. (2011). Shifting power? Assessing the impact of transparency and accountability initiatives. *IDS Working Papers*, 2011(383), 1-39.
- Neuman, W.L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Seventh Edition, Boston: Pearson.
- Patrizia, G., & R. Massimo. (2014). Transparency in Italian Non Profit Organizations. *Annals of the University of Oradea, Economic Science Series*, 23(1).
- Piotrowski, S. J., & G. G. Van Ryzin. (2007). Citizen attitudes toward transparency in local government. *The American Review of Public Administration*, 37(3), 306-323.
- Rasul, S. (2002). *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Jakarta: Detail Rekod.
- Simanjuntak, D. A., & Y. Januarsi. (2011). Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid. *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh*.
- Siskawati,E., Ferdawati, & Surya, F. (2016). Pemaknaan Akuntabilitas Masjid: Bagaimana Masjid dan Masyarakat Saling Memakmurkan? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1) doi: 10.18202/jamal.2016.04.7006.
- Yin, R. K. (1994). Discovering the future of the case study. Method in evaluation research. *Evaluation practice*, 15(3), 283-290.